

Analisis Rasio Pertumbuhan dan Keserasian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Ferica Christinawati Putri^{1*}

¹Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia

Email : [*fericacputri@borneo.ac.id](mailto:fericacputri@borneo.ac.id)

(*: corresponding author)

Abstrak– Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah berdasarkan rasio pertumbuhan dan keserasian dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020-2021. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis menggunakan rasio pertumbuhan dan keserasian menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan belanja adalah Belanja Barang dan Jasa serta arah pembangunan daerah berorientasi kinerja belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu pada kegiatan operasional daripada kegiatan belanja modal.

Kata Kunci: Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Belanja Daerah

Abstract– Budget Realization Reports (LRA) published by local governments as a form of local government accountability in providing information that is very useful for users of regional financial information to assess regional financial performance. LRA is one of the main regional financial accountability reports. Regional spending reflects local government policies and the direction of regional development. The object of research is the Provincial Government of North Sumatra. The aim of the study was to analyze the performance of regional spending based on the ratio of growth and compatibility in the Budget Realization Report (LRA) for the North Sumatra Provincial Government for the 2020-2021 fiscal year. The analytical method used is descriptive analysis method which is carried out by making a description of the problems that have been identified. From the results of the analysis which consists of analysis using the ratio of growth and compatibility shows the existence of spending growth. Expenditure that most influenced the increase in expenditure growth was Goods and Services Expenditure and the direction of regional development oriented to the performance of DKI Jakarta Provincial Government expenditure on operational activities rather than capital expenditure activities.

Keywords: Growth Ratio, Harmony Ratio, Regional Spending Ratio

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. (Nurul Amin, 2019).

Kedua aspek ini dapat disebut sebagai financial reform atau reformasi keuangan. Sehingga untuk mencapai pembangunan negara diperlukan pembiayaan dengan sistem distribusi yang adil, proporsional, demokratis, terbuka dan efisien. Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan oleh pemerintah kota dan satuan kerjanya setiap tahun

untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah kota untuk lebih memperhatikan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Secara ekonomis, efektif dan berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan prinsip efisiensi ekonomi, pengelolaan ekonomi daerah secara partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah. Dengan demikian suatu daerah yang dinilai memiliki efisiensi ekonomi yang baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-undang No.1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Riyanto (2001) rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan financial suatu perusahaan. Bagi pemerintah hasil laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan serta pengambilan keputusan. Selain pihak internal, analisis laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak publik (mayarakat).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengukuran kinerja Sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, Pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004: 121).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta evaluasi kinerja. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis dan pembiayaan. Objek penelitian ini adalah pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan elemen penting yang menarik perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (public fund) memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan secara benar, efisien, efektif dan untuk kepentingan publik melalui pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di provinsi Sumatera Utara yang berkenaan dengan merumuskan permasalahan yakni sejauh mana aktivitas pemerintahan memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan

belanja pembangunan secara optimal serta untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran mengalami pertumbuhan belanja secara positif atau negatif guna mengukur kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

2. METODE

2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, dimana dalam penelitian ini mengambil data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). penulis melakukan penelitian dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi anggaran dan juga didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan variable-variabel yang akan diteliti.

2.2 Tempat dan Waktu

Tempat yang menjadi objek penelitian dari penelitian ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan sejak April-Mei.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis Rasio-Rasio Kinerja pemerintah Daerah:

2.3.1 Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007)

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Secara umum belanja memiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola belanja daerah, melakukan efisiensi dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan yang ada pada setiap belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bahkan bisa dihilangkan atau dipangkas dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal dapat terjaga. Rasio pertumbuhan belanja dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2007).

$$r = \frac{Pn - Po}{Po}$$

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah /PAD/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-

Po = Total Daerah /PAD /Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

2.3.2 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang

digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja dapat berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja. Analisis Belanja Operasi terhadap total belanja dilakukan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Porsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja umumnya adalah 60 s.d 90%. Rasio keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan menggunakan rumus rumus (Mahmudi, 2007)

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis Belanja Modal terhadap total belanja dilakukan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Porsi Belanja Modal terhadap Total Belanja umumnya adalah antara 5 s.d 20%. Rasio keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2007) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah meneliti pada pemerintah provinsi Sumatera Utara, penulis memperoleh informasi yang diperlukan untuk perhitungan analisis belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data-data tersebut telah dicantumkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data-data keuangan yang telah diperoleh tersebut, maka perhitungan analisis belanja pemerintah provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2020/2021

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Pertumbuhan	
			Kenaikan/(Penurunan)	%
BELANJA DAERAH	12,653,607,434,218.00	13,225,393,166,670.30	571,785,732,452.30	4.52
BELANJA OPERASI	8,287,005,336,991.98	9,509,003,885,719.46	1,221,998,548,727.48	14.75
Belanja pegawai	3,337,823,171,792.00	3,372,531,926,884.00	34,708,755,092.00	1.04
Belanja Barang dan Jasa	1,882,423,096,799.98	2,828,790,517,550.80	946,367,420,750.82	50.27
Belanja hibah	3,066,759,068,400.00	3,285,226,861,027.66	218,467,792,627.66	7.12
Belanja bantuan sosial	-	22,454,580,257.00	22,454,580,257.00	
Bantuan keuangan	-	-	-	
BELANJA MODAL	1,497,944,969,133.07	1,141,203,699,701.86	(356,741,269,431.21)	-23.82
Belanja modal tanah	185,356,708,726.00	29,415,668,114.00	(155,941,040,612.00)	-84.13

Belanja modal peralatan dan mesin	421,144,729,678.00	322,381,442,941.10	(98,763,286,736.90)	- 23.45
Belanja modal gedung dan bangunan	240,314,232,826.07	169,305,548,746.79	(71,008,684,079.28)	- 29.55
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	538,515,511,860.00	517,043,457,513.48	(21,472,054,346.52)	-3.99
Belanja modal aset tetap lainnya	112,613,786,043.00	103,057,582,366.49	(9,556,203,676.51)	-8.49
BELANJA TAK TERDUGA	1,150,692,958,093.00	805,581,714.00	(1,149,887,376,379.00)	- 99.93
Belanja tak terduga	1,150,692,958,093.00	805,581,714.00	(1,149,887,376,379.00)	- 99.93
BELANJA TRANSFER	1,717,964,170,000.00	2,574,379,999,535.00	856,415,829,535.00	49.85
Belanja bagi hasil	1,717,964,170,000.00	2,574,379,999,535.00	856,415,829,535.00	49.85
Belanja bagi hasil pajak daerah	1,717,964,170,000.00	2,574,379,999,535.00	856,415,829,535.00	49.85
Belanja bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-	
JUMLAH BELANJA	12,653,607,434,218.00	13,225,393,166,670.30	571,785,732,452.30	4.52

Dari tabel di atas secara keseluruhan pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 571.785.732.452,30 atau 4,52 % dari tahun anggaran tahun 2020. Belanja yang mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja tahun 2021 adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar 50,27 %.

Tabel 2. Rasio Belanja Operasi

Tahun Anggaran	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	10.935.643.264.218,05	8.287.005.336.991,98	75,78 %
2021	13.225.393.166.670,32	9.509.003.885.719,46	71,90 %

Tabel 3. Rasio Belanja Modal

Tahun Anggaran	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2020	10.935.643.264.218,05	1.497.944.969.133,07	13,70 %
2021	13.225.393.166.670,32	1.141.203.699.701,86	8,63 %

Tabel 4. Perbandingan Antara Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Sumatra Utara

Tahun Anggaran	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Selisih
2020	0,7578	0,137	0,6208
2021	0,719	0,0863	0,6327
Total			1,2535
Rata-rata			0,62675

Tabel diatas menunjukkan besarnya selisih dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja. Dari tabel 4.4 diketahui bahwa besarnya selisih rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja adalah 0,62675 pertahun. Pada tabel diatas juga dapat dilihat perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal, dimana belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Pada tabel 4.4 menunjukkan presentase belanja operasional lebih besar dari total belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Utara lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan daerah Provinsi Sumatra Utara kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu, ke depannya Pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Belum ada tolak ukur yang pasti seberapa tinggi rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Sebagai daerah di negara berkembang, peran pemerintah provinsi Sumatra Utara untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih rendah perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di provinsi Sumatra Utara.

Pada bagian ini berisi analisa, hasil serta pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

- a. Dari analisis hasil pertumbuhan belanja tahun 2020/2021 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan belanja adalah Belanja Barang dan Jasa.
- b. Dari hasil analisis keserasian maka dapat diketahui Pemprov Sumatra Utara dalam melakukan aktifitas belanyanya, tidak hanya menfokuskan belanja pada belanja operasi akan tetapi juga kepada belanja modal. Namun, perbedaan antara kedua aktivitas belanja tersebut adalah aktivitas belanja operasi jauh lebih besar daripada belanja aktivitas belanja modal. Selisih rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan rasio belanja modal terhadap total belanja adalah 0,62675 per tahun.

REFERENCES

- Aisah, S., Deviyanti, D. R., & Kusumawardani, A. (2018). Analisis belanja daerah pada pemerintah kota samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4).
- Al Makka, H. (2015). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Amelia, S. A. (2022). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76-84.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(1), 80-91.
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(1), 49-58.
- Sibua, N., & Balamau, F. (2023). Analisis Kinerja Laporan Realisasi Anggaran Pada Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014-2018. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(1), 12-19.
- Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).